



Evaluasi Implementasi Sekolah Inklusi Menengah Pertama Negeri 175 Jakarta

Drinka Radisic, Isma Humaeroh, Siti Masruroh

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta

E-mail: drinkaradisic@gmail.com

Abstrak: Penyelenggaran pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jenis kekhususan yang paling sering ditemui adalah keterlambatan belajar. Penyesuaian perlu dilakukan oleh sekolah, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasaran pendidikan serta sistem pembelajaran. Pada penyesuaian tersebut mengalami kendala dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini menggunakan kajian evaluasi CIPP dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan sumber data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitiannya adalah wali kelas, guru mata Pelajaran IPS dan guru pendamping khusus (GPK). Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa kurikulum atau materi yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus dapat dikembangkan untuk peserta didik dengan kekhususan keterlambatan belajar. Implementasi kurikulum dalam pembelajaran peserta didik dengan kekhususan keterlambatan belajar terlaksana dengan cukup baik walaupun belum bekerja sama dengan guru pendamping khusus secara rutin.

Kata kunci: Evaluasi, Implementasi, Inklusi, SMPN 175 Jakarta

Abstract: The implementation of inclusive education aims to provide education for all, including children with special needs. The most frequently encountered type of specialty is learning delays. Schools need to make adjustments, both in terms of curriculum, educational facilities and infrastructure and learning systems. This adjustment experienced problems in implementing it. This research uses a CIPP evaluation study with a qualitative descriptive method based on data sources from observation, interviews and documentation. The research objects are the homeroom teacher, social studies teacher and special assistant teacher (GPK). The results of the evaluation show that the curriculum or materials provided to students with special needs can be developed for students with specific learning delays. The implementation of the curriculum in the learning of students with specific learning delays has been carried out quite well even though they have not collaborated with special accompanying teachers on a regular basis.

Keywords: Evaluation, Implementation, Inclusion, SMPN 175 Jakarta

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya (Saputra, 2016). Menurut paparan diatas Pendidikan inklusif adalah sistem layanan Pendidikan khusus yang mensyaratkan anak memiliki berkebutuhan khusus (ABK) belajar di sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama dengan teman seusianya. Sekolah yang penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di sekolah yang sama (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Sekolah yang menyediakan program pendidikan yang layak, Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh

para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat, yang terbuka bagi semua serta tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak.

Sekolah yang penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa dengan memiliki SDM yang tepat dan lengkap, mengakomodasi siswa baik karena keterbatasan fisik maupun mental, sekolah juga menyediakan program pendidikan layak dan menantang untuk siswa inklusi, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi membutuhkan penyesuaian di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, pengajaran, sosial, perilaku maupun budaya.

Oleh karena itu dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi harus kesesuaian dengan kurikulum yang ada serta kebijakan pemerintah, pendekatan pembelajaran, serta proses pembelajaran

dan sistem evaluasi dengan kondisi siswa. Sehingga kurikulum nasional harus dimodifikasi sedemikian dan semenarik mungkin guna untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hal ini dilakukan agar siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti dan melaksanakan pembelajaran seperti siswa normal lainnya. Dalam modifikasi kurikulum. Kurikulum pada penyelenggara pendidikan inklusif harus mencakup kurikulum nasional yang merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusif adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (Sumarni, 2019); (Pradipta, dkk, 2020).

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia (Depdiknas, 2009) yaitu: 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak Jurnal Pendidikan Anak, Volume 6, Edisi 1, Juni 2017 14 sesuai dengan kebutuhannya; 2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; 3) membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; 4) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran; 5) memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 32 ayat 1, UU no. 20 tahun 2003 khususnya Pasal 5 ayat 1, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51.

Dari tujuan pendapat parahli yang di paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Pendidikan inklusi untuk meningkatkan mutu sekolah dan membantu siswa-siswi berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak, siswa berkebutuhan khusus juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka seperti siswa-siswa yang normal pada umumnya, serta siswa berkebutuhan khusus juga dapat bersosialisasi dengan siswa lain. Sekolah yang menyelenggarakan sistem program pendidikan inklusi harus memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan yang telah ditentukan para guru ABK (Pradipta, dkk, 2021). gurunya pun harus memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

Guru yang berperan dalam pelaksanaan program pendidikan meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus (GPK) (Kemendikbud. 2012); Kustawan, 2012). Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga berfungsi menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran karena merupakan penunjang proses belajar siswa. (Martha & Suryana, n.d.). Permendiknas No 70 Tahun 2009 pasal 11 juga memberikan ketentuan bahwa sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel

agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

Sistem assesmen pembelajaran seharusnya dirancang dan dimodifikasi untuk mengetahui kondisi siswa, di mana assesmen pembelajaran ini meliputi tahap-tahapan perencanaan, yaitu pengumpulan informasi untuk mencapai hasil belajar siswa, dan pelaporan serta penggunaan informasi hasil belajar siswa. Dalam secara khusus assesmen juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang telah disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya, agar assesmen dapat memperoleh hasil yang secara optimal. Assesmen meliputi penilaian tertulis, sikap, kinerja atau produk, portofolio dan unjuk kerja. Dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009 juga ditentukan bahwa anak berkebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dibawah standar nasional pendidikan mendapat surat tanda tamat belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009 ditentukan pula bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua. Masyarakat dan orangtua harus berperan untuk mendukung Pendidikan anak-anaknya, karena Pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat juga harus berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penyediaan tenaga ahli, pelaksanaan pembelajaran, pendanaan, serta pengawasan dan penyaluran lulusan.

Untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusi Sekolah dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, terapi klinik, LSM dan masyarakat (Permendiknas No 70 Tahun 2009). Di Indonesia Sunardi, dkk, (2011), menemukan bahwa kebanyakan sekolah-sekolah telah mengembangkan rencana strategis (untuk program inklusif), namun masih banyak sekolah yang belum menata ulang struktur organisasi mereka. Peneliti lain, Sari (2012), juga menemukan bahwa pelaksanaan inklusi di SD Negeri tempat penelitiannya, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu peneliti menyarankan agar para guru, GPK, kepala sekolah memang benar-benar melakukan tanggung jawabnya dan tahu tugasnya sebagai penyelenggara sekolah inklusi. Maftuhatin (2014) juga menemukan bahwa evaluasi pembelajaran sudah cukup bagus karena guru sudah menerapkan dua metode dalam evaluasi yaitu dengan soal yang disamakan dengan reguler dan yang kedua dengan soal sesuai dengan kebutuhan mereka, disertai dengan portofolio yang mencatat perkembangan mereka selama pembelajaran. Sementara Lukitasari

(2017), menemukan bahwa dampak positif kebijakan pendidikan inklusi di kota penelitian mereka terlihat dari meningkatnya jumlah peserta didik ABK di sekolah reguler dari tahun ke tahun dan berkurangnya diskriminasi yang dialami siswa ABK oleh teman sebaya, guru dan masyarakat.

Hasil penelitian yang sedikit berbeda ditemukan oleh Widyawati (2017) di mana sekolah sudah mendapat izin dan juga panduan untuk melaksanakan program inklusif, namun infrastruktur khusus tidak memadai, sementara kurikulum sudah dimodifikasi. Kompetensi guru cukup memadai dalam menangani anak dengan kebutuhan khusus, sementara pendanaan pendidikan inklusi hanya mengandalkan dana BOS, dan tidak ada pemantauan terus menerus dari departemen pemerintahan terkait. Anak berkebutuhan khusus yang berprestasi dan tidak berprestasi sudah dilayani dengan baik. Dari berbagai hasil penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendidikan inklusi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama mengevaluasi program Pendidikan Inklusi. Perbedaannya dengan penelitian-penelitian di atas adalah pada model evaluasi yang hendak digunakan, di mana penelitian ini menggunakan Model Evaluasi Konteks Input Proses Product (CIPP)

Salah satu sekolah yang menerapkan program pendidikan inklusi adalah SMP Negeri 175 Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan diantaranya masih kurangnya SDM dalam proses pembelajaran selaku GPK. SMP Negeri 175 Jakarta hanya memiliki 1 orang GPK dimana GPK tersebut juga diberikan amanah diluar jobdesc yang sudah ditentukan dari dinas pendidikan. Maka dari itu GPK tersebut merasa kewalahan menguasai tugasnya sebagai GPK.

Selain sekolah juga belum memiliki JUKNIS untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Dengan banyaknya hambatan yang dihadapi sekolah dan belum pernah dilakukan evaluasi program pendidikan inklusi di SMP Negeri 175 Jakarta, maka peneliti melakukan penelitian evaluasi program pendidikan inklusi. Selanjutnya Tayibnapis (2008) menambahkan bahwa evaluasi program harus mengumpulkan informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya, informasi yang berguna untuk program yang dievaluasi.

Dapat dipahami bahwa evaluasi program adalah rangkaian kegiatan dalam upaya untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan sengaja dalam tingkat keterlaksanaan secara cermat, fakta dan dapat dipercaya serta berguna untuk di evaluasi, untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan kebijakan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas dari masing-masing komponen siswa terhadap program

yang sedang dilaksanakan maupun program yang sudah dilaksanakan sehingga evaluasi dapat berjalan sesuai tujuan dan mendapat hasil yang lebih maksimal. Dari paparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap program semestinya harus dievaluasi baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang berlangsung, agar dapat program itu dapat menjadi hasil maksimal sehingga tujuan dari program tersebut tercapai Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi desain, instalasi, proses dan produk pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 175 Jakarta.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model Konteks Input Proses Product (CIPP) untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 175 Jakarta.

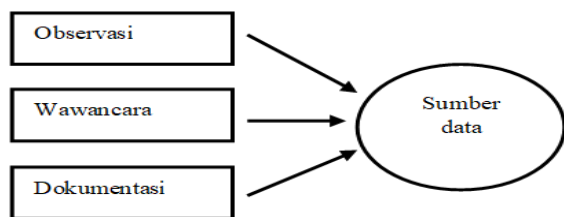
CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam merupakan model evaluasi yang memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu: tahap konteks, input, proses, dan produk (Kurniawati, 2021). Evaluasi dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu: Evaluasi Konteks dengan menganalisis kebijakan dan tujuan yang ada, Evaluasi input berkaitan dengan pendidik, sarana prasarana, kurikulum, maupun kelengkapan administrasi,

Evaluasi proses yang mencakup sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berlangsung, Evaluasi Produk merupakan pengevaluasian hasil belajar peserta didik di ujian semester serta persentase kelulusan peserta didik saat mengikuti ujian akhir nasional. Sumber informasi dalam penelitian ini dalam Kepala Sekolah, wali kelas, dan Guru Bimbingan Konseling selaku GPK. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Peta konsep pada gambar 1 adalah sebuah gambaran mengenai Teknik pengambilan data dengan menggunakan Teknik triangulasi. Menggunakan Teknik ini karena penelitian ini bentuk kualitatif Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015). Standar minimal keberhasilan ini merupakan modifikasi dari pedoman umum penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yang dikeluarkan oleh Direktorat PPK – LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 1. Standar Minimal Keberhasilan

Aspek	Standar Minimal Keberhasilan
Contex	1) Adanya kebijakan untuk landasan Formal pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan inklusi bagi anak dengan kebutuhan khusus jenis lamban belajar di sekolah minimal tercantum dalam kurikulum sekolah. 2) Tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan inklusi minimal tercantum dalam kurikulum sekolah.
Input	1) Minimal 5% anak berkebutuhan khusus dari tiap rombongan belajar. 2) Guru minimal telah mengikuti pelatihan pendidikan inklusi tentang anak berkebutuhan khusus jenis lamban belajar. 3) Adanya modifikasi kurikulum yang dilakukan oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar ABK khususnya lamban belajar. 4) Sarana berupa ruangan berikut ruang keterampilan, ruang latihan bina diri, ruang penyimpanan alat, lapangan olahraga, ruang latihan fisik, ruang remedial teaching, ruang bina persepsi bunyi dan irama, ruang latihan bina wicara, ruang konsultasi, dan ruang asesmen. 5) Adanya kebijakan manajemen di kurikulum sekolah
Proses	1) Adanya Program Pembelajaran Individu (PPI) untuk ABK khususnya lamban belajar. 2) Adanya modifikasi kurikulum untuk ABK khususnya lamban belajar. 3) Adanya modifikasi cara penilaian dan pelaporan hasil evaluasi ABK khususnya lamban belajar
Produk	1) Adanya perkembangan kemampuan akademik ABK khususnya lamban belajar. 2) Adanya kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi ABK khususnya lamban belajar



Gambar 1. Teknik pengambilan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 1 merupakan modifikasi dari pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi. Untuk pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif di SMP Negeri 175 Jakarta di kecamatan Jagakarsa, kota Jakarta Selatan.

Aspek Konteks

Analisis hasil wawancara dan temuan pada aspek konteks perlu diperbaiki karena Kebijakan dari pemerintah untuk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ini belum cukupi dan belum sesuai dengan peraturan pemerintah. Padahal menurut Steniback dan Steinback seperti yang dikutip oleh Sunardi memaparkan, sekolah inklusi ialah sekolah yang di dalamnya menampung seluruh siswa di satu kelas, dimana juga menyediakan pendidikan yang menantang dan layak, namun tetap sesuai akan kebutuhan serta

kemampuan setiap siswa. Adanya penunjukan sekolah secara langsung dan masuknya program pendidikan inklusi kedalam rencana pengembangan sekolah akan dijadikan landasan yang baik untuk pengimplementasi pendidikan inklusi di berbagai sekolah.

Aspek Input

Komponen input dalam evaluasi ini adalah komponen sebagai faktor pendukung yang menguatkan jalannya program pendidikan Inklusi terdiri dari:

1. Kurikulum atau materi yang disampaikan, Kurikulum yang ideal untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni berupa sebuah kurikulum yang mampu mengakomodir kemampuan dan kebutuhan siswa sesuai akan kecerdasan, potensi, minat, dan bakatnya. Namun, temuan di lapangan menunjukkan kurikulum untuk pendidikan inklusi tidak dikembangkan menjadi kurikulum akomodatif yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa dengan kekhususan lamban belajar. Implementasi kurikulum dalam pembelajaran anak dengan kekhususan lamban belajar masih belum terlaksana secara baik dikarenakan wali kelas sulit untuk bertukar pendapat dengan guru pedamping khusus.

2. Kesiapan dari sumber daya manusianya dalam hal ini guru Kompetensi untuk dapat melayani dan menyampaikan materi pelajaran yang seusai dengan kebutuhan peserta didik inklusi dalam proses belajar mengajar erat kaitannya dengan pemahaman guru mengenai anak – anak berkebutuhan khusus, dan

sikap penerimaan keragaman peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hasil analisis temuan adanya kurangnya sumber daya guru yang mampu menangani siswa berkebutuhan khusus yang dikarenakan sekolah ini hanya memiliki satu orang guru pendamping khusus. Selain itu, guru pendamping khusus tersebut memiliki beberapa tugas diluar tugas pokok guru, misalnya menjadi wali kelas, bertanggung jawab di ekstrakurikuler dan menjadi guru mata pelajaran yang lain. Dengan demikian, sulitnya guru pendamping khusus untuk menerapkan sistem inklusi sesuai dengan peraturan pemerintah. Serta minimnya pemahaman guru reguler untuk menangani siswa berkebutuhan khusus dikarenakan tidak pernah mendapatkan pelatihan.

Aspek Proses

Perlu perbaikan karena pembelajaran untuk peserta didik dengan kekhususan lamban belajar masih belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan inklusi disebabkan oleh guru yang belum membuat dan melaksanakan rencana pembelajaran individual (RPI), proses pembelajaran belum sesuai dengan kurikulum akomodatif, materi belajar yang sama dengan peserta didik normal, dan kurangnya kerjasama dengan guru pendamping khusus (GPK) dalam proses pembelajaran karena GPK memiliki kegiatan yang padat diluar tugasnya sebagai GPK. Sekolah juga belum menyelenggarakan program pengembangan keterampilan dan bakat untuk anak dengan kekhususan lamban belajar sesuai bakat dan minatnya, serta tidak adanya program kompensatoris. hal ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif.

Aspek Produk

Perlu perbaikan dalam hal sistem penilaian dan pelaporannya karena Masih adanya sekolah yang membuat standar penilaian yang digunakan belum memenuhi standar kriteria minimum program, dimana tidak adanya penentuan SKL dan KKM khusus di sekolah tersebut untuk anak dengan kekhususan lamban belajar serta tidak terdapat cara menentukan nilai kkm bagi peserta didik dengan kekhususan lamban belajar. Sistem pelaporan, kebijakan khusus terkait dengan pengulangan kelas untuk anak – anak berkebutuhan khusus. Namun, masih ada beberapa sekolah yang mengambil kebijakan terkait dengan pengulangan kelas untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak dibedakan dengan peserta didik normal. Terkait dengan teknik/strategi penilaian sebagian besar guru sudah melakukakn modifikasi misalnya dengan melakukan penilaian portofolio, tes yang dimodifikasi dan penilaian berbasis kinerja agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat memenuhi capaian KKM.

Kriteria penentuan SKL bagi peserta didik berkebutuhan khusus termasuk sebuah upaya dalam

menilai seberapa berhasilnya penyelenggaraan pembelajaran yang sudah dilakukan. Menurut Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi memaparkan bahwasanya sekolah inklusi haruslah memodifikasi SKL untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan didasarkan kepada usia kronologisnya. Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah sudah secara khusus menentukan SKL untuk anak berkebutuhan khusus, dan sebagian sekolah juga telah berkerja sama dengan sekolah pada tingkat berikutnya untuk memastikan kelanjutan layanan pendidikan terkait.

Berdasarkan kendala – kendala yang ada saran berbentuk rekomendasi untuk pihak pemerintah dan sekolah terkait penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang dapat dijadikan pertimbangan di antaranya: Memberikan surat penunjukkan sekolah sebagai SPPI sehingga program pendidikan inklusinya menjadi lebih terprogram dan masuk dalam dokumen pengembangan serta rencana kerja, kurikulum, dan RAPBS, pemberian pelatihan dan pendampingan untuk guru – guru mengenai penyelenggaraan pelatihan Pendidikan inklusi terutama untuk anak dengan kekhususan lamban belajar, Pengadaan GPK untuk tiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, perlu perbaikan dalam memonitoring dan mengevaluasi dengan melibatkan secara aktif peran pengawas di tiap wilayah binaan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru perlu membuat kurikulum akomodatif untuk anak dengan kekhususan lamban belajar serta mengimplemtasikan RPI dan Perlu perbaikan dalam kebijakan pelaporan dan kebijakan keberlanjutan ABK lamban belajar ke jenjang Pendidikan selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari tiap aspek evaluasi CIPP tersebut menunjukkan bahwa sekolah menengah pertama negeri 175 Jakarta terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi khususnya untuk anak lamban belajar masih harus sedikit perbaikan karena adanya kekurangsiapan dalam tiap aspek proses dan produk.

Persiapan sekolah untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran kepada anak dengan kekhususan lamban belajar ditunjukkan dari kurikulum yang digunakan, pengembangan anggaran, guru, proses pembelajaran, sistem penilaian dan sarana prasarana sekolah. Beberapa hal yang menjadi tantangan sekolah selama menyelenggarakan pendidikan inklusi yakni: pelatihan tentang pendidikan inklusi dan memahami anak berkebutuhan khusus lamban belajar serta cara memberikan pelayanan pendidikan pada anak dengan kekhususan lamban belajar termasuk dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran, serta kurang ketersediaan guru GPK di sekolah sehingga menghambat

penyelenggaraan pendidikan inklusi yang berpihak pada anak berkebutuhan khusus lamban belajar.

Saran

Temuan dari penelitian ini adalah adanya kesiapan guru sehingga mampu merancang kurikulum modifikasi, Menyusun Rencana Pembelajaran Individu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan guru kepada peserta didik dengan kekhususan lamban belajar. Hal ini menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti cara agar guru dapat mempersiapkan diri agar mampu merancang kurikulum modifikasi dan menyusun rencana pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati, E. W. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model Cipp (Context, Input, Process, Product). <https://siducat.org/index.php/ghaitsa>
- Lukitasari, S., Sulasmono, B., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4, 121–134.
- Maftuhatin, L. (2014). Evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas inklusif di SD Plus Darul ‘Ulum Jombang. *Jurnal Studi Islam*, 5, 201–227.
- Martha, D., & Suryana, D. (n.d.). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif Anak Usia dini. Pendidikan, D., & Ambon, K. (2018). Peran Guru Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Desje Lattu. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 02. <http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt>
- Pradipta, R. F., Hermanto, Y. A. L., Oktaviani, H. I., Dewantoro, D. A., & Yasin, M. H. M. (2021). Development of Online Learning Resources as a Support System Learning from Home at SLB LAB UM. 2021 7th International Conference on Education and Technology (ICET), 100–106.
- Pradipta, R. F., Purnamawati, F., Efendi, M., Dewantoro, D. A., Huda, A., & Jauhari, M. N. (2020). The Role of The Resource Center in the Implementation of Inclusion Education in Basic, Medium, and Higher Education Institutions: A Grounded Theory Approach. 1st International Conference on Information Technology and Education (ICITE 2020), 490–496.
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. 1(3).
- Sari, W. Q. (2012). Pelaksanaan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1, 190–197.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sumarni. (2019). PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI MADRASAH MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN MADRASA. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 148–161.
- Sunardi. Mucawir, Y., Gunarhadi, Proyono, & John, L. , Y. (2011). The implementation of inclusive education for students with special needs in Indonesia. *Excellence in Higher Education.*, 2, 1–10.
- Tayibnapi, Yusuf. F. (2008). Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian. *Rineka Cipta*.
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 109–120.